

**STUDI TENTANG KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI (SLBN) TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Novira Cahya Wulan Sari<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

The Child With Special Needs (ADD/ADHD) as Indonesian, has a right to access education. Education is everyone need, included The Child With Special Needs (ADD/ADHD). They need special service in education which suitable with their characteristics. SLBN Tenggarong which located in Kutai Kartanegara is a special school build for them. The research found that Inklusi's school has not reserved in each district, less of teacher has special needs like therapy room, deafaid and others. Hopely, the policy can help them to have self-reliance to survive in society, self-defence for their self, so that people will not see them cynically in social life, know their talent, and there are some observers in Kutai Kartanegara who care about them.

**I. Latar Belakang**

Kebijakan publik adalah suatu keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik. Setiap kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai, baik tujuan yang dirumuskan bersifat abstrak sampai pada rumusan yang dibentuk secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Cita-cita atau tujaun yang ingin dicapai harus dinyatakan secara jelas, sehingga semua pelaksana dan sasaran pendidikan memahami atau mengetahui suatu proses kegiatan pendidikan.

Perkembangan manusia merupakan perubahan yang progresif dan berlangsung terus-menerus atau berkelanjutan. Tidak setiap anak mengalami perkembangan normal. Banyak di antara mereka yang dalam perkembangannya mengalami hambatan, gangguan, kelambatan atau memiliki faktor-faktor resiko sehingga untuk mencapai perkembangan optimal diperlukan penanganan atau intervensi khusus. Kelompok inilah yang di kenal sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Pendidikan bagi ABK merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat.

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu sekolah yang didirikan untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di kecamatan Tenggarong. Sama seperti sekolah lainnya, tiap tahunnya dibuka penerimaan untuk siswa ABK. Dengan keseluruhan jenjang pendidikan 12 tahun. SLB dituntut mampu berperan sebagai pusat sumber guna membantu melayani kebutuhan informasi dan konsultasi bagi sekolah, dalam memahami kebutuhan khusus ABK dan layanan pembelajaran, serta dalam pengadaan guru khusus, sosialisasi, dan pendampingan.

Pemerintah Kutai Kartanegara dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara juga dituntut untuk membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan internal sekolah, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan di

---

<sup>1</sup> Dosen Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kutai Kartanegara, email: novira\_cahya15@yahoo.co.id

bidang pendidikan inklusi, menyediakan guru khusus, memberikan subsidi berupa bantuan anggaran khusus dan dalam pengadaan media, alat, dan sarana khusus yang dibutuhkan sekolah, program pendampingan, monitoring dan evaluasi program, maupun dalam sosialisasi ke masyarakat luas.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi ABK masih menyisakan berbagai permasalahan seperti belum adanya pemahaman mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan, belum tertampungnya anak-anak yang tergolong ABK dan belum tersedianya sumber daya pendidik yang benar-benar memiliki pengetahuan dan *basic* pendidikan untuk ABK. Melihat kondisi yang ada saat ini, tentu perlu menjadi perhatian kita, bahwa pendidikan itu penting untuk siapapun, bahkan untuk ABK.

Permasalahan yang ditemui saat ini bisa dilihat dari tenaga pendidik dan sarana yang ada. Idealnya untuk mendidik anak autisme, diperlukan 1 (satu) guru untuk 1 anak. Tetapi pada kenyataannya, terkadang 1 (satu) guru harus membimbing hingga 5-8 anak dalam satu kelas atau yang sering disebut dengan rombel (rombongan belajar). Tenaga pengajar yang berlatar belakang pendidikan berkebutuhan khusus yang masih kurang, serta ketersediaan sarana atau fasilitas seperti ruang terapi untuk saat ini belum ada untuk membantu anak-anak sesuai dengan ketunaan mereka.

Peran serta Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pendidikan bagi ABK sangat diperlukan demi tercapainya pemerataan pendidikan dan untuk mencapai prestasi serta mengembangkan kemampuannya secara optimal, bagi ABK di kecamatan Tenggarong Kutai Kartanegara salah satunya dengan menyediakan atau membangun sekolah-sekolah inklusi untuk menampung anak-anak yang bertempat tinggal di luar Tenggarong. Kondisi asrama bagi anak-anak yang “dititipkan” ke SLBN Tenggarong juga perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah karena kondisi gedung asrama kurang memadai untuk saat ini dan hanya sekali mengalami perbaikan, dan itupun “hanya” atap saja.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan hasil pengamatan singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada indikasi pelaksanaan pendidikan inklusi yang terealisasi pada kegiatan pembelajaran pada umumnya di sekolah dasar inklusi masih belum optimal dan belum berjalan sesuai prinsip pendidikan inklusi itu sendiri. Pendidikan inklusi hendaknya menjadi pendidikan fasilitator untuk semua siswanya terutama pada siswa berkebutuhan khusus. Baik guru kelas inklusi maupun guru pendamping khusus hendaknya mengetahui tugas dan peran masing-masing sehingga dapat berkolaborasi menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah dan fungsional.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. PENGERTIAN KEBIJAKAN**

Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis”.

#### **a. Implementasi Kebijakan**

Menurut teori yang dikemukakan Weimer dan Vining (1999:396) dalam Subarsono (2013:103) ini, ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni :

- (1) Logika kebijakan. Dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoretis.
- (2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. Dalam hal ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan disuatu daerah tertentu, tetapi ternyata gagal diimplementasikan didaerah lain, karena kondisi lingkungan yang berbeda.
- (3) Kemampuan implementor kebijakan. Dalam hal ini tingkat kompetensi dan ketrampilan dari para implementor sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan, karena merekalah implementor dari program tersebut.

#### **b. Evaluasi Kebijakan**

Menurut Subarsono (2013:119), “Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui *outcome*, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu di implementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggarng waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dlam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan”.

#### **c. Analisis Kebijakan**

Menurut Dunn (2003:29) dalam Pasolong (2007:41) mengatakan bahwa “analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan”.

### **2.2. PENGERTIAN PENDIDIKAN**

Dewantara dalam Hasbullah (2011:2-4), “Pendidikan ialah tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya”.

### **2.3. PENGERTIAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)**

Dalam UU No.20 Tahun 2003 pasal 5 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa “*warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus*”. Dan pada pasal 32 ayat (1), “*bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa*”.

## 2.4. FOKUS PENELITIAN

- 1) Dasar Hukum Pelaksanaan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SLBN Tenggarong.
- 2) Pelaksanaan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SLBN Tenggarong
- 3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan ABK pada SLBN Tenggarong.
- 4) Harapan dan Upaya-upaya dalam pelaksanaan pendidikan ABK di SLBN Tenggarong.

## III. METODE PENELITIAN

### 3.1 LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian kali ini adalah SLBN Tenggarong Kutai Kartanegara.

### 3.2 SUMBER DATA

Yang menjadi sumber data primer kali ini adalah : Kepala Sekolah SLBN Tenggarong, Guru-Guru di SLBN Tenggarong serta Orang Tua ABK. Dan yang menjadi sumber data sekundernya adalah data-data dari SLBN Tenggarong dan dokumentasi penelitian.

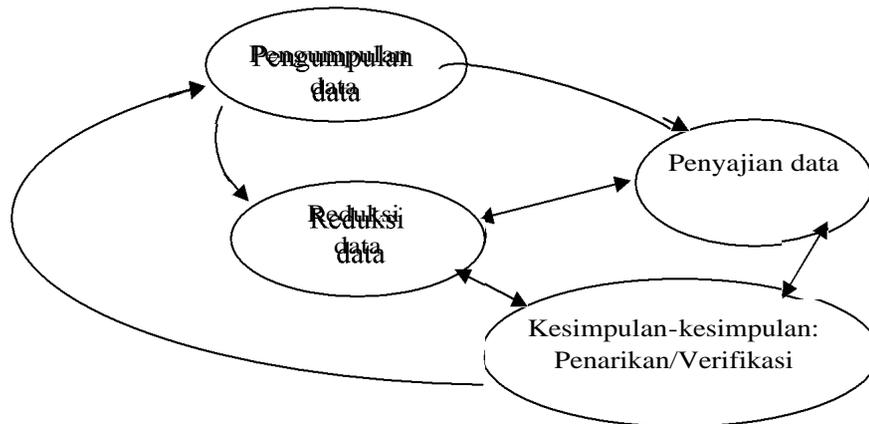
### 3.3 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Data Primer, diperoleh melalui Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu : Observasi, dan Wawancara
2. Data Sekunder diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

### 3.4 PROSEDUR ANALISIS DATA

Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (2007:15-20).



#### **IV. HASIL PENELITIAN**

##### **4.1 PROFIL SLBN TENGGARONG**

SLBN Tenggarong beralamat di Jalan Kemuning No.41 Kelurahan Panji Tenggarong, 75514. Pada tanggal 18 Januari 2010 diterbitkan SK Pendirian Perubahan SDLB menjadi SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor SK 800/K.103/V/2010. Memiliki luas tanah 3.618 m<sup>2</sup>.

SLBN Tenggarong berdiri sejak tahun 1985 dan pada tahun 2012 mengalami perubahan dari SDLB 047 yang hanya jenjang SD menjadi SLBN Tenggarong yang memiliki jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Tujuan SLBN Tenggarong adalah membina dan mendidik Anak Berkebutuhan Khusus. Adapun visi SLBN Tenggarong yaitu “Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Yang Optimal Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Sehingga Memiliki Sikap Pribadi, Pengetahuan, Terampil, Mandiri Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Dan misi SLBN Tenggarong dilaksanakan melalui :

1. Melaksanakan KBM dan Bimbingan secara optimal.
2. Menciptakan pembelajaran yang kreatif
3. Mengembangkan keterampilan hidup (*life skill*)

##### **4.2 PEMBAHASAN**

###### **1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Tenggarong.**

Landasan/Dasar Hukum pelaksanaan pendidikan bagi ABK di SLBN Tenggarong yaitu :

1. UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada : BAB IV Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah, Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 ayat (1) sampai (5) dan Bagian Kesebelas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, pasal 32 ayat (1) sampai (3).
3. Keinginan dan Kemauan Orang Tua
4. Setiap anak memiliki bakat/minat yang perlu dibina

###### **2. Pelaksanaan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SLBN Tenggarong** Sistem Pendidikan / Pola Pengajaran meliputi :

1. Memiliki jenjang pendidikan dari TKLB, SDLB, SMPLB hingga SMALB
2. Terdiri dari beberapa Rombel (Rombongan Belajar)
3. Kegiatan ekstrakurikuler
4. Ujian Sekolah/UAS (khusus Tuna Grahita dan Autis) dan Ujian Nasional/UAN (khusus Tuna Rungu, Tuna Netra, Tuna Daksa)

###### **3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan ABK pada SLBN Tenggarong**

Kendala utama yaitu :

1. Belum tersedianya sekolah-sekolah inklusi di tiap kecamatan
2. Kurangnya tenaga pengajar berlatar belakang pendidikan khusus.
3. Kurangnya fasilitas khusus ketunaan, contoh : ruang terapi, alat bantu dengar dan lain-lain.

**4. Harapan dan Upaya-upaya dalam pelaksanaan pendidikan ABK di SLBN Tenggarong**  
Harapan yaitu :

1. Kemandirian/memiliki bekal hidup dalam bermasyarakat, pembiasaan diri serta tidak dipandang sebelah mata dalam kehidupan bermasyarakat
2. Mengetahui potensi minat/bakat anak
3. Adanya lapangan pekerjaan/diterimanya bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki
4. Adanya pemerhati masalah ABK.

Upaya \_ upaya yang sudah dilakukan yaitu :

Dari Pemerintah Pusat : Pemberian beasiswa/biaya penunjang pendidikan tiap tahunnya. Untuk jenjang pendidikan SD dan SMP nominal yang diberikan sebesar Rp 1.100.000,- tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang-barang perlengkapan sekolah. Sedangkan untuk jenjang SMA diberikan dalam bentuk uang tunai dengan nominal sebesar Rp 2.240.000,-. Adapun pemberian bantuan beasiswa kepada siswa ini dengan tujuan untuk meringankan beban orang tua siswa, memberi motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar, memberi motivasi kepada orangtua untuk lebih memperhatikan

1. pendidikan anaknya serta mendorong sekolah untuk lebih memberikan pelayanan pendidikan.
2. Dari SLBN Tenggarong : mengikutsertakan anak-anak mengikuti perlombaan sesuai dengan bakat mereka, mengadakan sosialisasi ke kecamatan untuk menyadarkan orang tua bahwa pendidikan anak sangatlah penting.

## **5.PENUTUP**

### **5.1 KESIMPULAN**

1. Kebutuhan akan pendidikan adalah milik semua orang, tidak terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keterbatasan yang dialami menjadikan Anak Berkebutuhan Khusus memerlukan layanan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak (memiliki dasar hukum).
2. Sistem atau pola pendidikan pada SLBN Tenggarong meliputi jenjang pendidikan dari TKLB, SDLB, SMPLB hingga SMALB, tiap kelas terdiri dari beberapa Rombel (Rombongan Belajar), adanya kegiatan ekstrakurikuler (renah, perkemahan, tata boga dan lainnya), serta pelaksanaan Ujian Sekolah/UAS (khusus Tuna Grahita dan Autis) dan Ujian Nasional/UAN (khusus Tuna Rungu, Tuna Netra, Tuna Daksa)
3. Kendala-kendala atau hambatan yang ditemui, yaitu belum tersedianya sekolah-sekolah inklusi di tiap kecamatan, kurangnya tenaga pengajar berlatar belakang pendidikan khusus, serta masih kurangnya fasilitas khusus ketunaan.
4. Harapan adanya pelaksanaan pendidikan bagi ABK di SLBN Tenggarong yaitu tercipta kemandirian/memiliki bekal hidup ABK dalam bermasyarakat, pembiasaan diri serta idak

dipandang sebelah mata dalam kehidupan bermasyarakat, mengetahui potensi minat/bakat anak, adanya lapangan pekerjaan/diterimanya bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki serta adanya pemerhati masalah ABK di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 5.2 SARAN

1. Bagi Pemerintah :
  - a) hendaknya memperhatikan pelaksanaan pendidikan bagi ABK di SLBN Tenggarong, dengan memberikan bantuan seperti pemenuhan fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung pendidikan bagi anak-anak, mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua, bahwa anak-anak mereka berhak memperoleh pendidikan.
  - b) Mendirikan sekolah-sekolah inklusi di tiap kecamatan, sehingga anak-anak yang berada di luar daerah tidak perlu jauh-jauh untuk bersekolah.
  - c) Menyediakan lapangan pekerjaan bagi ABK sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, dengan menggunakan sistem “jemput bola”, yaitu mendatangi ke sekolah atau orang tua, untuk meminta izin memberikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan anak.
  - d) Adanya Peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang keselamatan ABK ketika mereka berada di dunia kerja, sehingga hak-hak dan kewajiban mereka terpenuhi.
2. Bagi SLBN Tenggarong : Memberikan bantuan kepada lulusan SLBN Tenggarong untuk bisa memperoleh pekerjaan dengan merekomendasikan ABK ke tempat-tempat yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
3. Bagi orang tua : Hendaknya tidak malu untuk mengenalkan anaknya pada “dunia luar”, dalam hal ini menyekolahkan anaknya, karena anak memiliki bakat/potensi yang luar biasa dan anak tersebut perlu wadah/media untuk menyalurkan bakat mereka. Selain itu dukungan dan motivasi dari keluarga menjadi penentu utama keberhasilan pendidikan bagi anak tersebut.
4. Bagi peneliti selanjutnya : mengkaji lebih dalam lagi tentang pelaksanaan pendidikan bagi ABK. Karena pada tesis kali ini hanya membahas SLBN Tenggarong. Kedepannya peneliti selanjutnya, bisa mengangkat masalah pelaksanaan pendidikan bagi ABK pada Yayasan Autis.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Peraturan & Perundang-undangan :**

- Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**B. Buku Referensi :**

- Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Hasbullah. 2011. *Dasar-Dasar Pendidikan, Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Moleong, Lexy.J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik : Teori Dan Praktek*. Jakarta : Grasindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Subarsono,AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta